

# Newsletter Pusdatin



## Daftar Isi

- Top Digital Awards 2024: Pusdatin Terapkan Generatif AI dan Keamanan Siber Untuk Optimalkan Layanan, Halaman 1
- Perkuat Harmonisasi Data, Kementan Teken MoU Dengan BPS, Halaman 4
- Rafaksi Gabah Dihapus Untuk Menjaga Semangat Petani Untuk Menanam, Halaman 6
- Rakor Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Halaman 7
- Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2024, Halaman 10
- Mengubah Data Menjadi Kebijakan: Gasss Dengan DSS, Halaman 11

**Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan**



[bit.ly/surveipusdatin](https://bit.ly/surveipusdatin)

## Top Digital Awards 2024: Pusdatin Terapkan Generatif AI dan Keamanan Siber Untuk Optimalkan Layanan

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 telah menyelesaikan tahapannya, melibatkan 615 instansi pusat dan daerah, termasuk kementerian dan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi, 48 instansi berhasil memperoleh predikat memuaskan, mencerminkan peningkatan kualitas layanan berbasis digital di berbagai sektor pemerintahan. Keputusan Menteri PANRB No. 663/2024 mencatat bahwa indeks SPBE nasional mencapai 3,12 dari skala 5, melampaui target RPJMN 2020–2024 sebesar 2,60.

Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE melalui beberapa tahapan, seperti penilaian dokumen, wawancara, dan visitasi. Fokus utama evaluasi adalah mengukur sejauh mana penerapan SPBE meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik secara terpadu. Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan, “Hasil ini menunjukkan bahwa instansi pusat dan daerah semakin berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang digital dan akuntabel, sejalan dengan visi transformasi digital nasional”.

## Kinerja Kementerian Pertanian Dari Kebijakan Hingga Layanan Publik

Kementerian Pertanian mencatatkan pencapaian yang menonjol dalam Evaluasi SPBE 2024, dengan indeks sebesar 4,0 yang masuk dalam kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan keberhasilan kementerian dalam membangun tata kelola berbasis elektronik yang terintegrasi. Kebijakan internal kementerian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 33/2023, yang menjadi acuan untuk arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Kebijakan ini mencakup aspek penting

# Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan  
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Roydatul Zikria, S.Si, MSE

Dr. Nugroho Setyabudhi, S.kom, MM

Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si

Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE

Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE

Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Rizky Purnama R, S.Kom

Didik Pratama Saputra, S.Kom

ST Ananda Yukarina, S.Si

Rahma Andany, S.Kom

Yusri Ardi, S.Kom

Marwati

Priatna Sari

## Alamat Redaksi



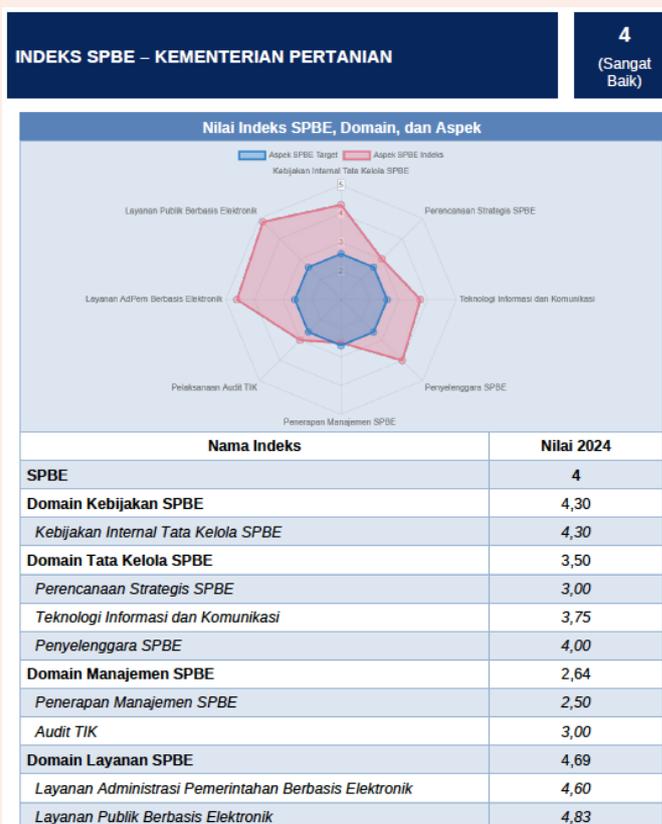
PUSAT DATA DAN  
SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,  
Ragunan - Jakarta 12550

Telp : 021- 7822638

e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

seperti keamanan informasi, manajemen data, serta layanan jaringan intra yang mendukung komunikasi antar unit kerja.

Di bidang kebijakan internal, Kementerian Pertanian telah memenuhi sebagian besar indikator dengan tingkat kematangan tinggi, yaitu rata-rata pada level 4 hingga 5. Hal ini mencerminkan komitmen kementerian dalam memastikan setiap langkah digitalisasi dilakukan secara menyeluruh dan berbasis standar. Selain itu, revisi kebijakan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi.



Hasil Indeks SPBE Kementerian Pertanian Tahun 2024

Dalam hal perencanaan strategis, kementerian telah menyusun dokumen peta rencana SPBE yang komprehensif, namun evaluasi menemukan perlunya peningkatan integrasi inovasi proses bisnis dengan standar *Business Process Model and Notation* (BPMN). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkecil gap antara kebutuhan operasional dan implementasi SPBE agar semakin selaras dengan visi digitalisasi kementerian.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi pilar penting keberhasilan SPBE di Kementerian Pertanian. Infrastruktur TIK yang telah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional

mendukung efisiensi layanan, seperti sistem penghubung layanan yang dilengkapi dengan pedoman operasional. Meskipun demikian, beberapa unit kerja masih memerlukan optimalisasi penggunaan teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam layanan publik berbasis elektronik, kementerian mencapai tingkat kematangan tertinggi. Integrasi dengan Aplikasi OSS-BKPM (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) untuk layanan perizinan telah memangkas waktu proses, sementara aplikasi SIMWAS-Itjen memberikan efisiensi dalam pengawasan internal. Layanan ini mendapat apresiasi tinggi karena memberikan dampak nyata pada kemudahan akses dan transparansi pelayanan publik. Selain itu, aplikasi berbagi pakai nasional seperti SAKTI mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, dan layanan kearsipan menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah terintegrasi dengan baik.

Namun, evaluasi juga menyoroti kelemahan, seperti kurangnya dokumentasi SOP terkait pengelolaan layanan pusat data dan perlunya pembaruan dalam sistem audit keamanan serta evaluasi tindak lanjutnya. Kementerian Pertanian diharapkan terus melakukan penguatan kebijakan dan peningkatan manajemen perubahan untuk memastikan seluruh unit kerja dapat beradaptasi dengan transformasi digital secara optimal.

### **Transformasi Digital Dalam Perspektif Global**

Pencapaian SPBE Indonesia mendapat pengakuan internasional yang signifikan. Berdasarkan survei e-Government yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2024, Indonesia naik 13 peringkat ke posisi 64 dari 193 negara. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan pesat Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi dalam pemerintahan.

Selain itu, survei Universitas Waseda yang dilakukan bersama *International Academy of CIO (IAC)* menempatkan Indonesia di peringkat 24 dari 66 negara, melampaui beberapa negara maju lainnya. Survei ini menilai aspek seperti inovasi proses bisnis, infrastruktur teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri PANRB menegaskan bahwa pengakuan global ini harus menjadi motivasi bagi instansi pusat dan daerah untuk terus memperkuat transformasi digital.

### **Rekomendasi Untuk Masa Depan SPBE**

Evaluasi SPBE 2024 memberikan serangkaian rekomendasi strategis untuk meningkatkan penerapan SPBE di Indonesia. Di antaranya adalah penguatan kebijakan internal, seperti pembaruan SOP terkait pengelolaan pusat data dan pembangunan aplikasi SPBE. Selain itu, perencanaan strategis harus lebih terintegrasi dengan standar internasional, seperti BPMN.

Dalam aspek infrastruktur, evaluasi merekomendasikan perluasan pemanfaatan TIK di semua unit kerja, serta integrasi yang lebih kuat dengan platform nasional seperti Pusat Data Nasional. Peningkatan manajemen perubahan, audit yang berkelanjutan, dan kolaborasi lintas unit kerja juga diharapkan dapat mempercepat transformasi digital yang lebih merata di seluruh instansi pemerintah.

### **Menuju Pemerintah Digital yang Berdaya Guna**

Implementasi SPBE yang kuat diharapkan menjadi pilar utama transformasi digital pemerintah Indonesia. Dengan fokus pada pelayanan publik yang efektif dan efisien, evaluasi ini menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik. Kementerian PANRB berharap, melalui sinergi antara instansi pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, SPBE dapat mencapai tujuannya sebagai penggerak utama pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Evaluasi ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk mendukung transformasi digital secara menyeluruh, menciptakan layanan publik yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

# Perkuat Harmonisasi Data, Kementan Teken MoU Dengan BPS

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) selaku Walidata lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menginisiasi pembaruan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 4 sampai 5 tahun. Bahkan Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Amanat Presiden tersebut menjadi momentum sinergi dan kolaborasi antara Kementan dan BPS dalam penyediaan statistik pertanian yang berkualitas. Data pertanian berkualitas merupakan dasar *evidence-based policy* untuk kebijakan strategis Pembangunan pertanian nasional.

Kolaborasi Kementan dan BPS di sektor pertanian telah berlangsung sejak lama. Hal ini ditandai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Harmonisasi Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Pertanian. MoU yang ditandatangani tahun 2019 tersebut menjadi payung hukum kerjasama pemanfaatan data oleh kedua belah pihak. MoU antara Kementan dan BPS ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asa saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi data dan/atau informasi melalui penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik bidang pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pada Kamis (30/01/2025) bertempat di Kantor Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widayanti menandatangani MoU tentang Harmonisasi Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Pertanian. MoU tersebut merupakan pembaruan atas Nota Kesepahaman sebelumnya yang telah habis masa berlakunya pada Desember 2024. Penandatanganan ini turut juga dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama lingkup Kementerian Pertanian, termasuk juga Kepala Pusdatin Intan Rahayu.



Menteri Pertanian dan Plt. Kepala BPS menandatangani MoU Harmonisasi Data Pertanian

“Alhamdulillah Kementan dan BPS sudah sepakat untuk Satu Data agar tidak menciptakan polemik di publik. Kami sudah memerintahkan jajaran Kementan agar tidak mengeluarkan data, yang boleh mengeluarkan data hanya BPS,” ujar Mentan.

Amran juga menambahkan bahwa hitungan sementara dari BPS, produksi padi bulan Januari hingga Maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan jadi pendorong Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BPS mengapresiasi upaya Kementan dalam pemanfaatan data menjadi suatu kebijakan. “Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan misalnya dalam memanfaatkan hasil survei KSA, ubinan dan data-data lainnya yang berasal dari BPS,” papar Amalia.

Amalia juga mengapresiasi Kementan karena telah meraih penghargaan Anindhita Wistara Data sebagai juara pertama kategori kementerian dalam penyelenggaraan statistik sektoral. “Sekali lagi kami mengapresiasi Kementan atas koordinasi dalam pembinaan data statistik. Kini data yang digunakan telah mengacu pada Satu Data,” tegasnya.

Dalam menyukseskan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementan dengan BPS tersebut, Pusdatin berperan menyusun konsep dan substansi MoU berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementan, Biro Humas dan Hukum BPS, serta Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya, MoU tersebut menjadi payung hukum bagi satuan kerja lingkup Kementan dalam melaksanakan kerjasama yang lebih teknis dengan BPS.



Kementan dan BPS sepakat wujudkan Satu Data Pertanian

Penulis : Roydatul Zikria

**Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025**

- Berdasarkan Kepmenpan 644/2024, Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 sebesar 9,55 juta ton.
- Adapun Provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatera Utara.
- Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapotri, Panglima TNI dan Jaksas Agung untuk memastikan distribusi pupuk subsidi transparan dan tepat sasaran.

**Per 1 Januari 2025 Pupuk Subsidi Siap Ditebu**

- Pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 diprioritaskan untuk semua petani dengan standar utama mempunyai lahan dibawah 2 hektare.
- Pemerintah telah memangkas 145 aturan regulasi distribusi pupuk. Sehingga mulai 1 Januari petani yang sudah terdaftar dalam eRDCK dapat menebus pupuk subsidi dengan langsung datang ke kios pengecer atau melalui gapoktan dengan KTP atau kartu Tani.
- Penebusan pupuk subsidi juga dapat diwakilkan kepada kelompok tani atau keluarga jika terkendala sakit atau berhalangan.

**Andi Amran Sulaiman**  
Kasubditansi

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati  
www.pertanian.go.id

**#FunFactTani**  
**Beda Manfaat Pupuk Organik dan Anorganik**

**Pupuk Organik**

- Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan
- Meningkatkan produktivitas lahan dan mencegah degradasi lahan
- Dapat memperbaiki sifat tanah, kimia, dan biologi tanah, serta lingkungan.
- Membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan kaya hara
- Membantu menjaga kelembaban tanah
- Dapat meningkatkan populasi dan aktivitas mikroba dalam penyediaan hara tanaman
- Pupuk kandang:** efektif menyuburkan tanah dan tanaman.
- Pupuk hijau:** membantu meningkatkan kualitas tanah.

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati  
www.pertanian.go.id

**#FunFactTani**  
**Pupuk Anorganik**

- Pupuk urea: mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman
- Pupuk ZA: menambah unsur hara nitrogen dan sulfur pada tanah, memperbaiki kualitas tanaman, menambah nilai gizi pada hasil panen, membantu tanaman agar terhindar dari hama.
- Pupuk SP-36: membantu tanaman pada masa reproduksi
- Pupuk KCl: Meningkatkan resistensi terhadap hama dan penyakit sehingga hasil panen lebih meningkat
- Dolomite: sebagai penyedia unsur hara makro sekunder berupa kalsium dan magnesium.
- Penggunaan pupuk kimia dapat meningkatkan produksi tanaman secara cepat dan mencukupi kebutuhan hara tanaman.

**\*Catatan: Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat merusak kualitas tanah. Harap gunakan dengan bijak.**

Sumber: "Pupuk Organik Dibuatnya Mudah, Hasil Tanaman Melimpah" (Kementan, 2022)

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati  
www.pertanian.go.id

## Rafaksi Gabah Dihapus Untuk Menjaga Semangat Petani Menanam

**M**enteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jumat 31 Januari. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Rakor ini membahas serapan gabah khususnya Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog, dalam rangka memperkuat cadangan stok beras Nasional. Selain itu ditetapkan juga untuk Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.

“Sudah diputuskan diperintahkan oleh Bapak Presiden, beli gabah Rp.6.500, beli jagung Rp.5.500, oleh karena itu harga tidak boleh ditawar-tawar”, ujar Zulkifli Hasan pada konferensi pers setelah Rakor.

Selain itu, pada rakor ini diputuskan juga terkait pencabutan kebijakan rafaksi atau penyesuaian harga gabah untuk kualitas yang berbeda pada GKP. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan ini sebagai bukti bahwa negara hadir terhadap rakyatnya.

"Kita kan ingin petani sejahtera. Jadi, Bulog itu membeli dengan harga sesuai HPP, sesuai perintah Presiden Prabowo yaitu Rp. 6.500 per-kg *at any quality* (kualitas apapun), dengan jumlah gabah target 3 juta ton setara beras," tutur Sudaryono.

“Kalau kita lihat data BPS, ada kenaikan rata-rata 50 persen Januari-Maret dibanding tahun sebelumnya. Ini kita harus jaga moril petani jangan sampai harga jualnya rendah sehingga enggak semangat lagi nanam,” ungkap Sudaryono.

Adapun perihal kapasitas gudang penyimpanan beras, Wahyu mengaku pihaknya pun telah bekerja sama dengan para anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi). Tujuannya sebagai gudang tambahan, apabila gudang-gudang milik Bulog masih kurang.

"Bisa tetap disimpan di tempat-tempat anggota

Perpadi dengan sistem gudang filial atau kita yang membayar sewanya. Pendek kata, Bulog siap lah ya, ini tugas mulai soal swasembada pangan dari Pak Presiden," ucap Wahyu.

Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan tampak dari kebijakan menetapkan HPP GKP di petani Rp. 6.500 per kg. Penyesuaian ini dengan tujuan melindungi petani kita dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan.



Rakor Gabah di Kemenko Pangan

Penulis : Didik Pratama



# Rakor Pangan Provinsi Sumatera Selatan

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, Senin 13/01/2025. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Rakor ini membahas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menko Pangan menyatakan, rakor ini merupakan bagian dari sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program swasembada pangan nasional.

Sementara itu, Mendag menyatakan bahwa per 10 Januari 2025 harga barang kebutuhan pokok secara nasional cenderung stabil apabila dibandingkan bulan lalu. Adapun komoditas yang mengalami peningkatan harga antara lain telur ayam ras naik 5,54% menjadi Rp. 32.400/kg, daging ayam ras naik 3,11% menjadi Rp. 39.800/kg, dan cabai naik 44–81%.

Mendag menambahkan, untuk wilayah Sumatera Selatan, harga barang kebutuhan pokok juga cenderung stabil dan serupa dengan kondisi harga nasional di mana kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai yang melewati harga acuan. Khusus untuk Minyak Kita, harga relatif stabil Rp. 16.900/liter, tapi masih di atas HET. Untuk itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat akan memasuki periode puasa dan lebaran.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri UMKM, Maman Abdurrahman; Wamen Dalam Negeri, Bima Arya; Wamen Pertanian, Sudaryono; Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Faizal Malik Hendropriyono; Dirut BULOG, Wahyu Suparyono; Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi; Pj. Gubernur Sumatra Selatan, Elen Setiadi; Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang; dan para bupati/

wali kota se-Provinsi Sumatera Selatan.



*Pelaksanaan Rakor Bidang Pangan di Sumatera Selatan*

Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pertanian menyampaikan beberapa hal :

1. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempunyai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024” yang tertuang dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik. Didalam 17 program prioritas, Kementan akan mencapai swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan benih, pupuk dan pestisida; dan melanjutkan hilirisasi berbasis sumber daya alam. Untuk itu perlu diperkuat sinergisme antara Kementerian Pertanian dengan berbagai *stakeholder* termasuk dengan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya.

2. Untuk mendukung upaya menuju Indonesia Emas tersebut, Kementan sudah menyusun Blue Print Pembangunan Pertanian 2024-2029 dengan target meningkatkan pertumbuhan PDB pertanian dari 0,18% pada tahun 2023 menjadi 4,00% pada tahun 2029.

3. Ada lima program yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, yaitu: (i) program swasembada pangan nasional, (ii) program pengembangan komoditi ekspor, (iii) program peningkatan produksi susu untuk pangan bergizi, (iv) program pekarangan pangan bergizi, dan (v) program mandiri energi B-50.

4. Secara nasional terjadi penurunan Luas Baku Sawah sebesar 79 ribu ha dari sebelumnya yang 7,46 juta ha pada tahun 2019, menjadi 7,38 juta ha pada tahun 2024. Sebaliknya di Sumsel malah meningkat dari sebelumnya 407.602 ha

menjadi 519.484 ha di tahun 2024.

5. Total luas panen padi Sumsel tahun 2024 diperkirakan mencapai 521,25 ribu ha atau mengalami peningkatan sebesar 17,11 ribu hektare (3,39 %) dibanding tahun 2023.

6. Total produksi beras di Sumsel tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,63 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 562 ribu ton (0,35 %) dibanding tahun 2023.

7. Kunci swasembada pangan yang akan kita capai meliputi: 1) Ketersediaan irigasi, 2) Ketersediaan benih, 3). Ketersediaan pupuk, 4) Program tumpang sisp padi gogo/sawit, 5) Cetak sawah, 6) Serap gabah oleh Bulog, dan 7) Pengawasan oleh TNI dan Polri.

8. Peningkatan Jaringan Irigasi

- Pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah masing-masing.

- Sudah disampaikan Surat Mentan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota tanggal 6 Des 2024 perihal Identifikasi Kebutuhan Fasilitasi Irigasi di masing-masing provinsi/kabupaten sebagai bahan perencanaan perbaikan sarana irigasi tahun 2025.

- Kebutuhan fasilitasi perbaikan irigasi di Sumsel tahun 2025 seluas 202.128 ha terdiri: (i) Rehabilitasi jaringan irigasi primer, (ii) Jaringan irigasi sekunder (iii) Jaringan irigasi tersier, (iv) Normalisasi saluran, (v) Pembuatan pintu air, dan (vi) Irigasi lainnya .

- Saat ini sedang diproses Inpres terkait percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan jaringan irigasi mendukung swasembada pangan.

9. Distribusi Pupuk Bersubsidi

- Rperpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah disusun dan disampaikan kepada Presiden pada 24 November 2024 untuk ditetapkan.

- Penyederhanaan penetapan alokasi dan proses distribusi pupuk bersubsidi yang cepat dan tepat sasaran, utamanya tepat penerima.

- Penguatan Gapoktan sebagai penerima

langsung pupuk bersubsidi, melalui masa transisi selama 6 (enam) bulan.

- Perluasan penerima pupuk bersubsidi ke Pembudi Daya Ikan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

- Alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel tahun 2025 sebesar 294.079 ton.



*Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Memberikan Paparan pada Rakor Bidang Pangan*

10. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

- Urgensi pendayagunaan penyuluh pertanian oleh pusat : (1) perlunya pendampingan program pertanian modern untuk mencapai sawsembada pangan, (2) dukungan penyuluh pertanian di daerah belum optimal, (3) pemenuhan kebutuhan penyuluh di daerah belum menjadi prioritas, dan (4) kesenjangan jumlah desa pertanian dengan jumlah penyuluh.

- Jumlah penyuluh pertanian di Sumsel sebanyak 1.231 dengan komposisi: PNS 728 orang, P3K 463 orang, dan THL-TBPP sebanyak 40 orang.

- Substansi pendayagunaan penyuluh oleh pusat: (1) Pengalihan penyuluh pertanian ASN dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke Kementerian Pertanian; (2) Pengalihan tersebut diperlukan untuk pendayagunaan penyuluh pertanian dalam pencapaian swasembada pangan; dan (3) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mensinergikan peran penyuluh pertanian ASN, penyuluh pertanian swadaya dan swasta dalam pelaksanaan percepatan program swasembada pangan berkelanjutan.

11. Penyediaan Bibit Unggul

- Target tanam padi provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 seluas 1,70 juta ha, dengan kebutuhan benih padi sebesar 52.912 ton.

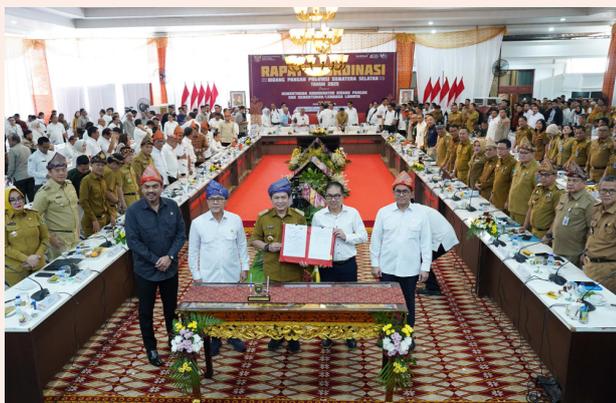
- Ditjen TP berkomitmen dengan

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk penyediaan benih in situ atau dari provinsi lain yang surplus.

- Untuk bibit ternak unggul tahun 2024 telah di produksi sebanyak 790.764 bibit, dan tahun 2025 akan diproduksi sebanyak 1.488.200 bibit ternak unggul.

12. Tahun 2025 ini pemerintah berkomitmen untuk tidak impor beras, jagung, gula dan garam.

Terkait dengan merebaknya wabah PMK, mohon kewaspadaan dan kesiapsiagaan aparat pemda untuk terus melakukan *survelience* dan memantau perkembangan PMK dan melaporkan ke Ditjen PKH.



Penutupan Rakor Bidang Pangan di Sumatera Selatan

Penulis : Rahma Andany



# Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin Tahun 2024

Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator kinerja organisasi pemerintahan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Walidata sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian, dan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022, yang berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan bertanggung jawab memberikan pelayanan serta publikasi data dan informasi pertanian pada Kementerian Pertanian melalui situs Kementerian Pertanian, media cetak, media elektronik, dan media publikasi resmi lainnya.

Tujuan dan manfaat Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin adalah :

- 1) Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin;
- 2) Mengetahui unsur-unsur pelayanan Pusdatin yang perlu ditingkatkan;
- 3) Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pertanian oleh Pusdatin terhadap publik; dan
- 4) Merumuskan upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan Pusdatin

secara berkelanjutan.

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 ini dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2024 dengan menggunakan metode *web-based*, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi secara daring melalui aplikasi Simpeldatin: <https://simpeldatin.setjen.pertanian.go.id/> ataupun tautan berikut: <https://bit.ly/surveipusdatin>. Partisipasi melalui survei berbasis web ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan penilaian secara cepat dan efisien, di mana pun mereka berada, tanpa harus datang ke kantor.

No.	Unsur	Jumlah Nilai Per Unsur Pelayanan			Nilai Rata-Rata Per Unsur			Nilai Indeks		
		SM I	SM II	2024	SM I	SM II	2024	SM I	SM II	2024
1	Kemudahan Persyaratan Administrasi	724	548	1272	3,32	3,65	3,46	0,37	0,41	0,38
2	Kemudahan Alur Proses Pelayanan	750	480	1230	3,44	3,19	3,34	0,38	0,35	0,37
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	723	453	1176	3,32	3,02	3,20	0,37	0,34	0,36
4	Pelayanan Tanpa Dipungut Biaya/Tarif	872	600	1472	4,00	4,00	4,00	0,44	0,44	0,44
5	Layanan yang Sesuai Kebutuhan	730	465	1195	3,35	3,10	3,25	0,37	0,34	0,36
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	741	600	1341	3,40	4,00	3,64	0,38	0,44	0,40
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	735	553	1288	3,37	3,68	3,50	0,37	0,41	0,39
8	Penanganan Pengaduan	820	521	1341	3,76	3,48	3,64	0,42	0,39	0,40
9	Sarana dan Prasarana yang Tersedia	803	537	1340	3,68	3,58	3,64	0,41	0,40	0,40
Nilai Indeks								3,52	3,52	3,52
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat								87,90	88,07	87,98
Kinerja PUSDATIN								<b>( B ) BAIK</b>		

Nilai Indeks Per Unsur Layanan Pusdatin Semester I & II Tahun 2024

Dari hasil pengolahan indeks kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan tahun 2024 diperoleh nilai indeks untuk Semester I (Januari – Juni) sebesar 3,52 dan nilai IKM sebesar 87,90 dengan kinerjanya adalah Baik dan untuk semester II (Juli – Desember) nilai indeks sebesar 3,52 dan nilai IKM sebesar 88,07 dengan kinerjanya adalah Baik. Maka pada akhir tahun 2024 nilai indeks sebesar 3,52 dan nilai IKM sebesar 87,98 dengan kinerjanya adalah Baik.

Jumlah responden survei tahun 2024 sebanyak 368 responden, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 189 orang dan perempuan sebanyak 170 orang.

Hasil Survei sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Pusdatin termasuk perlu atau tidaknya kebijakan dari pimpinan Pusdatin dalam menindaklanjuti umpan balik tersebut dan mengidentifikasi skala prioritas serta alokasi anggaran, kemudian dengan merencanakan tindak lanjutnya.

Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelayanan untuk meningkatkan penerapan penyelenggaraan pelayanan publik, yang secara langsung tentunya akan

meningkatkan IKM sebagai indikator kinerja organisasi.

Melakukan monitoring dan pengendalian pada sistem dan prosedur pelayanan Pusdatin serta melakukan kaji ulang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna baik untuk produk maupun kecepatan layanan.

Hasil Analisis berdasarkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, terdapat beberapa unsur yang menjadi prioritas perbaikan kinerja dari yang terendah, yaitu: Kecepatan Waktu Pelayanan; Layanan Yang Sesuai Kebutuhan; dan Kemudahan Alur Proses Pelayanan.

Beberapa kritik dan saran terhadap pelayanan publik di Pusdatin, antara lain: peningkatan kehandalan website SIMPELDATIN, karena pada jam tertentu akses ke portal website sangat lamban, walaupun tetap dapat diakses; perlu update katalog data yang dapat diakses terkait informasi data yang tersedia; dan diperlukannya sosialisasi informasi mengenai SIMPELDATIN agar dapat dilakukan melalui berbagai media sosial sehingga dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Penulis : Iswadi

## Mengubah Data Menjadi Kebijakan: Gasss Dengan DSS

Dalam era digitalisasi pertanian, pengambilan keputusan berbasis data menjadi semakin krusial bagi para pemangku kebijakan. Salah satu alat yang dapat membantu dalam proses ini adalah *Decision Support System* (DSS). DSS merupakan sistem yang menyajikan informasi secara visual, *real-time*, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sejatinnya sistem berbasis komputer ini memang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menganalisis data, mengevaluasi alternatif, dan memilih keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. DSS mengintegrasikan berbagai sumber data, teknik analisis, dan model simulasi untuk memberikan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

### Mengapa DSS Diperlukan?

*Decision Support System* (DSS) diperlukan oleh suatu organisasi karena membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Beberapa alasan utama mengapa DSS menjadi penting adalah:

1. Visualisasi Data yang Jelas. Dashboard menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator yang mudah dipahami, sehingga pimpinan dapat segera melihat tren dan kondisi terkini;
2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data. Dengan DSS, keputusan dibuat bukan hanya berdasarkan intuisi atau asumsi semata. Pengambilan kebijakan dilakukan setelah melakukan analisis tren, proyeksi produksi, serta evaluasi efektivitas program pertanian berdasarkan data historis dan *real-time*;
3. Efisiensi Operasional. Dashboard membantu organisasi dalam mengelola sumber daya dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas;
4. Monitoring Kinerja Secara *Real-Time*. Organisasi dapat terus memantau pencapaian target dan melakukan penyesuaian strategi secara cepat;



5. **Prediksi dan Analisis Risiko.** Dengan bantuan AI dan IoT, DSS dapat memprediksi potensi masalah dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampak negatif.



Lalu bagaimana peran *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT) dalam DSS? Teknologi kecerdasan buatan secara masif saat ini dapat membantu menganalisis data historis dan tren pasar untuk memberikan rekomendasi keputusan yang lebih akurat. Sedang IoT yang sudah banyak digunakan di berbagai sektor, kini juga merambah ke pertanian dan dapat memberikan informasi yang bisa terintegrasi langsung ke dalam DSS. Selanjutnya dengan algoritma dan perhitungan yang tepat, kombinasi AI dan IoT dapat juga memungkinkan informasi kepada DSS terkait peringatan dini atau rekomendasi tindakan yang diperlukan secara otomatis berdasarkan data-data yang terkumpulkan.

Berikut adalah contoh implementasi DSS di sektor pertanian:

1. **Prediksi Panen dan Cuaca:** Dengan mengintegrasikan data cuaca dan pola tanam, DSS dapat membantu petani dan pemerintah dalam menentukan waktu tanam yang optimal.
2. **Analisis Harga Komoditas:** DSS juga dapat menampilkan tren harga dari berbagai pasar sehingga memungkinkan tindakan intervensi kebijakan yang lebih tepat.
3. **Alokasi Sumber Daya:** Data terkait kebutuhan dan ketersediaan pupuk, benih, serta alat pertanian dapat digunakan untuk distribusi yang lebih efisien.

Berdasarkan beberapa kemampuan yang dihasilkan oleh DSS sebagaimana poin-poin pemaparan diatas, dapat disampaikan bahwa DSS bukan hanya sebagai alat bantu visualisasi data, tetapi juga dapat menjadi opsi dalam perumusan kebijakan pertanian yang lebih strategis dan tepat sasaran. Dengan penerapan DSS yang optimal, diharapkan sektor pertanian dapat berkembang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Implementasi DSS yang baik akan mendorong pengambilan keputusan dengan berdasar pada fakta dan bukan intuisi.

Jadi bagaimana menurut anda, perlukah pengembangan dan penerapan sistem ini menjadi prioritas dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Gaskeun kita?

Penulis : Apriadi Setiawan



[satudata.pertanian.go.id](http://satudata.pertanian.go.id)